





narasumber untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran yang diperlukan sebagai landasan berdirinya Perguruan Tinggi Agama Islam dimaksud. Dalam sesi akhir pertemuan bersejarah tersebut, forum mengesahkan beberapa keputusan penting yaitu: (1) Membentuk Panitia Pendirian IAIN, (2) Mendirikan Fakultas Syariah di Surabaya, dan (3) Mendirikan Fakultas Tarbiyah di Malang. Selanjutnya, pada tanggal 9 Oktober 1961, dibentuk Yayasan Badan Wakaf Kesejahteraan Fakultas Syariah dan Fakultas Tarbiyah yang menyusun rencana kerja sebagai berikut:

- a. Mengadakan persiapan pendirian IAIN Sunan Ampel yang terdiri dari Fakultas Syariah di Surabaya dan Fakultas Tarbiyah di Malang.
- b. Menyediakan tanah untuk pembangunan Kampus IAIN seluas 8 (delapan) Hektar yang terletak di Jalan A. Yani No. 117 Surabaya.
- c. Menyediakan rumah dinas bagi para Guru Besar.

Pada tanggal 28 Oktober 1961, Menteri Agama menerbitkan SK No.17/1961, untuk mengesahkan pendirian Fakultas Syariah di Surabaya dan Fakultas Tarbiyah di Malang. Kemudian pada tanggal 01 Oktober 1964, Fakultas Ushuluddin di Kediri diresmikan berdasarkan SK Menteri Agama No. 66/1964.

Berawal dari 3 (tiga) fakultas tersebut, Menteri Agama memandang perlu untuk menerbitkan SK Nomor 20/1965 tentang Pendirian IAIN Sunan Ampel yang berkedudukan di Surabaya, seperti dijelaskan di atas. Sejarah mencatat bahwa tanpa membutuhkan waktu yang panjang, IAIN Sunan Ampel ternyata mampu berkembang dengan

pesat. Dalam rentang waktu antara 1966-1970, IAIN Sunan Ampel telah memiliki 18 (delapan belas) fakultas yang tersebar di 3 (tiga) propinsi: Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Namun, ketika akreditasi fakultas di lingkungan IAIN diterapkan, 5 (lima) dari 18 (delapan belas) fakultas tersebut ditutup untuk digabungkan ke fakultas lain yang terakreditasi dan berdekatan lokasinya. Selanjutnya dengan adanya peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1985, Fakultas Tarbiyah Samarinda dilepas dan diserahkan pengelolaannya ke IAIN Antasari Banjarmasin. Disamping itu, fakultas Tarbiyah Bojonegoro dipindahkan ke Surabaya dan statusnya berubah menjadi fakultas Tarbiyah IAIN Surabaya. Dalam pertumbuhan selanjutnya, IAIN Sunan Ampel memiliki 12 (dua belas) fakultas yang tersebar di seluruh Jawa Timur dan 1 (satu) fakultas di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Sejak pertengahan 1997, melalui Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1997, seluruh fakultas yang berada di bawah naungan IAIN Sunan Ampel yang berada di luar Surabaya lepas dari IAIN Sunan Ampel menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang otonom. IAIN Sunan Ampel sejak saat itu pula terkonsentrasi hanya pada 5 (lima) fakultas yang semuanya berlokasi di kampus Jl. A. Yani 117 Surabaya.

Pada 28 Desember 2009, IAIN Sunan Ampel Surabaya melalui Keputusan Menkeu No. 511/KMK.05/2009 resmi berstatus sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Dalam dokumen yang ditandasahkan pada



- 2) Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam
  - 3) Prodi Sastra Inggris
  - 4) Fakultas Dakwah dan Komunikasi
  - 5) Prodi Ilmu Komunikasi
  - 6) Prodi Komunikasi Penyiaran Islam
  - 7) Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
  - 8) Prodi Bimbingan Konseling Islam
  - 9) Prodi Manajemen Dakwah
- b. Fakultas Syariah dan Hukum
- 1) Prodi Ahwal al-Syahshiyah (Hukum Keluarga Islam)
  - 2) Prodi Siyasah Jinayah (Hukum Tatanegara dan Hukum Pidana Islam)
  - 3) Prodi Muamalah (Hukum Bisnis Islam)
- c. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
- 1) Prodi Pendidikan Agama Islam
  - 2) Prodi Pendidikan Bahasa Arab
  - 3) Prodi Manajemen Pendidikan Islam
  - 4) Prodi Pendidikan Matematika
  - 5) Prodi Pendidikan Bahasa Inggris
  - 6) Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
  - 7) Prodi Pendidikan Raudhotul Athfal
- d. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- 1) Prodi Ilmu Politik













di UIN Sunan Ampel Surabaya juga tergolong 2 macam yaitu di tingkat universitas dan tingkat fakultas. UKM yang ada di UIN Sunan Ampel Surabaya antara lain: seni budaya, pencak silat, UPTQ, IQMA, MAPALSA, UKOR dan lain sebagainya. Setiap mahasiswa mempunyai bakat dan minat sekalipun itu berbeda-beda, untuk mahasiswa yang mempunyai jiwa kepemimpinan dapat menyalurkan bakatnya untuk memilih dan mengikuti kegiatan ekstra kurikuler.

Organisasi ekstra kampus merupakan organisasi mahasiswa yang aktivitasnya berada di luar lingkup universitas atau perguruan tinggi. Organisasi ekstra kampus biasanya gabungannya dengan partai politik tertentu walaupun tidak secara keseluruhan. Dalam kampus UIN Sunan Ampel Surabaya banyak sekali organisasi-organisasi ekstra yang juga membantu mahasiswa untuk memberi wawasan yang lebih luas tentang dunia kampus dan perkuliahan. Organisasi ekstra diantaranya Ikatan Mahasiswa Muslim (IMM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), serta berbagai Organisasi Mahasiswa Daerah (ORMADA). Organisasi ekstra ini memang tidak semuanya ikut dalam politik kampus. Tetapi mereka juga sering dilibatkan sebagai basis masa atau suara dari partai peserta pemilu raya mahasiswa. ORMADA di UIN Sunan Ampel Surabaya yang mempunyai basis masa besar di kampus antara lain Himpunan Mahasiswa Surabaya (HIMABAYA), Ikatan Mahasiswa Gresik (IMAGRES), Ikatan Mahasiswa Bangkalan (IKAMABA), Himpunan Mahasiswa Sampang



kepentingan mahasiswa UIN Sunan Ampel secara umum. Partai politik mahasiswa merupakan mahasiswa UIN yang sah secara administratif, untuk partai baru salah satu syaratnya adalah harus mempunyai sekurang-kurangnya 1000 suara, dan untuk partai lama sebanyak 800 suara, dengan ketentuan di tiap-tiap distrik atau fakultas minimal mempunyai perwakilan dengan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan. Partai Politik Mahasiswa bertujuan melambangkan demokrasi di lingkungan kelembagaan mahasiswa di bawah naungan institusional UIN Sunan Ampel. Proses Pemilihan Umum Raya Mahasiswa (PEMIRA) pada tahun ini hanya diikuti oleh dua Partai Politik Mahasiswa (PPM), karena yang masuk seleksi verifikasi oleh panitia penyelenggara atau Komisi Pemilihan Umum raya Mahasiswa adalah dua partai saja yaitu: Partai Republik Mahasiswa (PAREM) dan Partai Reformasi Mahasiswa (PRM). PAREM merupakan partai yang incumbent dalam pemilu raya mahasiswa tahun 2016. Partai ini mempunyai basis masa terbesar di fakultas tarbiyah. Sedangkan PRM juga merupakan partai *incumbent* yang mempunyai basis masa di setiap fakultas di UIN Sunan Ampel Surabaya.



Sebelum diuraikan tentang proses pemilihan Dewan Eksekutif Mahasiswa yang ada di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, berikut peneliti paparkan terkait hal pokok yang menjadi kajian utama dalam penelitian ini, yaitu sosialisasi, partisipasi, strategi dan konflik dan dalam proses politik kekuasaan yang menjadi kajian utama adalah legitimasi, pengambilan keputusan, kebijakan pada proses pemilihan Dewan Eksekutif Mahasiswa. Politik kekuasaan merupakan kemampuan untuk membuat masyarakat dan negara terhegemoni. sehingga masyarakat dan pihak lain tidak bergerak sama sekali. Berikut kami paparkan proses pemilihan dan proses politik kekuasaan.

**a. Sosialisasi Politik**

Mahasiswa kampus merupakan sebuah miniatur masyarakat. Kebutuhan akan pemimpin dalam mahasiswa adalah suatu keniscayaan dalam kehidupan kampus. Dibutuhkan sosok pemimpin yang memiliki kapasitas yang kopten dalam pengelolaan masyarakat atau mahasiswa kampus. Dalam pemilihan umum Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya ini adalah momentum terpenting dalam mencari sebuah sosok pemimpin. Pemilihan umum raya Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Ampel surabaya ini adalah sebuah hajatan politik kampus. Seluruh mahasiswa atau bisa dibidang masyarakat kampus memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam momentum pemilihan tersebut. Pemilihan umum raya Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya bukan semata-mata











yang berpikir demi pengabdian dalam masyarakat. Seperti poin yang ada di tri darma perguruan tinggi yaitu pengabdian.

Kampus sebagai tempat manusia untuk menimba ilmu memberikan ruang berbagai ranah pemikiran, mulai dari pemikiran kiri maupun yang kanan. Isu-isu nasional maupun internasional saat ini selalu saja menjadi garapan menarik bagi mahasiswa dalam analisis wacana. Mahasiswa selalu memainkan peran atau menjadi aktor pemain dalam sebuah negara manapun. Mulai dari negara kecil maupun yang besar. Namun melihat fakta sehari-hari di lapangan ternyata mahasiswa dalam belajar berpolitik memberikan ruang yang sempit terhadap keidealismenya mereka. Padahal mahasiswa dulu belajar politik untuk membuat perubahan yang lebih baik terhadap sebuah kenegaraan. Tetapi sekarang ini kampus sebagai tempat untuk belajar berpoliti hanya digunakan sebagai tempat untuk kepentingan suatu golongan saja. Sepetinya halnya pada saat pemilihan Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya ini. Dalam pemilihan tersebut banyak golongan mahasiswa mempunyai tujuan dalam kepentingannya untuk menguasai sebuah kekuasaan yang ada di kalangan mahasiswa ini. Dalam bangku pemerintahan Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya ini banyak para golongan mahasiswa untuk merebutkan bangku kekuasaan tersebut. bahkan dalam perebutan kekuasaan tersebut dari unit golongan itu untuk menguasai kekuasaan menggunakan strategi yang tidak baik untuk di tiru. Dari pengertian yang luas Politik kekuasaan

adalah proses dimana seseorang atau kelompok untuk melindungi kepentingannya sendiri atau kelompok dengan mengancam entitas lain melalui agresi militer, ekonomi, atau politik. Berikut ini adalah proses politik kekuasaan yang ada di pemilihan Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya 2016:

**a. Demokrasi**

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Dan model demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut: Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan). Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Kampus UIN Sunan Ampel Surabaya dalam politiknya menggunakan sistem demokrasi. Di Kampus UIN Sunan Ampel Surabaya kita belajar untuk menjadi agen perubahan akan demokrasi. Selama hampir dari 4 tahun saya akan lulus ini telah saya pahami bagaimana berjalannya model demokrasi politik dalam kampus. Namun yang saya rasakan demokrasi politik











### c. Pengambilan keputusan atau wewenang

Dalam sidang Kongres Besar Mahasiswa Universitas (KBMU) mempunyai tugas dan wewenang yang dibawa ketika pemilu. Tugas tersebut merupakan sebuah amanat yang dilaksanakan dan dilakukan oleh KOPURWA. Dalam Proses pengambilan keputusan tersebut menjadi sebuah momentum yang sangat penting dalam sebuah kampus demokrasi. Dasar pemikiran penyusunan politik kampus pada saat pemilihan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas yang terkandung dalam sistem manajemen sidang, berlandaskan ideologi UU KBMU. Politik kampus yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem demokrasi yang menurut UU KBMU. Jaringan pemerintah dan lembaga-lembaga kampus UIN Sunan Ampel tersebut adalah MUSEMA, jaringan ini merupakan “suprastruktur politik” yang ada diorganisasi intra kampus. Sedangkan badan-badan ekeskutif yang ada didalam kampus adalah DEMA (Dewan Eksekutif Mahasiswa) disebut sebagai “infrastruktur politik”. Tetapi yang berwenang dalam sistem demokrsi kampus MUSEMA. Sebelum pergantian kekuasaan setiap tahunya MUSEMA membuat sidang yang namanya sidang KBMU. Dimana sidang itu, terdapat perubahan-perubahan Undang-undang dalam sistem organisasi. Dan dalam hasil perubahan undang-undang itu, nantinya akan menjadi sebuah kebijakan-kebijakan dalam organisasi tersebut.

#### **d. Pembentukan Kopurwa**

Kita mengenal adanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses pemilihan umum dalam suatu pemerintahan negara. Dialah yang menyelenggarakan pemilihan umum tersebut. KPU ini dibentuk berdasarkan Keputusan presiden. Yang berisikan tujuh orang anggota. KPU ini berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Dalam pemilihan Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya ini dalam prakteknya juga menggunakan istilah yang ada di pemerintahan kita ini. Hanya berbeda nama saja, tetapi pada prakteknya sama. dalam kampus UIN Sunan Ampel Surabaya kita mengenal istilah tersebut sebagai Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa (KOPURWA). KOPURWA ini juga mendapatkan surat keputusan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas untuk melaksanakan pemilihan umum. Dalam undang-undang KBMU juga disebut bahwa KOPURWA adalah panitia penyelenggara pemilu raya yang mendapat rekomendasi dari DEMA demisioner. Seperti yang diungkapkan oleh ketua KOPURWA yang bernama Rama dari fakultas Tarbiyah:

“Dibentuknya pemilu raya dari DEMA sebelum pergantian Dema memberikan mandat sama saya untuk menjadi ketua KOPURWA. Sebelum terbentuk kopurwa pun ada sidang KBMU yang diadakan oleh Musema mulai dari sidang KBMU itu undang-undang Pemilihan dibentuk antara lain syarat mendirikan partai dan syarat pemilihan. Setelah itu saya membentuk anggota 5 komisioner. Karena saya mengkaca pada pemerintahan Indonesia KPU ada lima komisioner. Dan empat komisioner itu saya yang SK. Dan saya sebagai ketua di SK oleh DEMA U demisioner berhubung saya yang di Sk oleh Dema otomatis











pemberritahuan informasi, kurang lebih ada mahasiswa yang mengetahui akan penyelenggaraan PEMIRA (pemilihan raya) dan ada juga mahasiswa yang tidak mengetahuinya. Maka akan berdampak pada partisipasi politik mahasiswa tersebut.

#### **f. Kebijakan**

Kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu, pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai keputusan untuk melaksanakannya. Dan yang membuat kebijakan adalah pihak yang berwenang dalam hal pemerintahan. Seperti dalam proses pemilihan raya (PEMIRA) dewan eksekutif mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, yang berwenang dalam membuat kebijakan adalah MUSEMA pada saat kongres Besar Mahasiswa Universita dan KOPURWA dalam pelaksanaan pemilihan raya. KOPURWA membuat kebijakan-kebijakan mulai dari syarat-syarat pencalonan dan model pemilihan. Tetapi pada prakteknya dalam proses pemilihan terdapat kebijakan-kebijakan yang mempersulit para calon kandidat dan bahkan Cuma menguntungkan satu pihak kandidat saja. Walaupun kebijakan dari KOPURWA mengaca pada Sidang KBMU tetapi masih terdapat kesenjangan dalam prosesnya. Seperti yang diungkapkan oleh Informan yang bernama Imam Hanafi Hafads Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu sosial dan politik semester 9, beliau





(PEMIRA) Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya bukan hanya bicara soal pertarungan individu kandidat (dengan segala atribut yang dimilikinya), akan tetapi secara sadar harus dipahami sebagai poses kolektifitas tim politik. Dalam menghadapi situasi dan kondisi seperti tersebut, maka pilihan-pilihan strategi pemenangan harus cermat dan tepat sesuai dengan kondisi lapangan politik tersebut.

#### **h. Konflik**

Dalam pelaksanaan Pemilihan Raya (PEMIRA) Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya menorehkan catatan buruk. Ajang yang seharusnya menjadi tempat memilih calon secara demokrasi justru berubah menjadi kerusuhan. Itulah yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan raya (PEMIRA) Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya.

Ini bukan pertama kalinya pemilihan raya menuai konflik. Dari tahun pertahun di setiap pemilihan raya pasti terjadi konflik. Ada beberapa faktor yang memicu konflik. Pertama, dalam penyelenggaraan pemilihan raya terkadang tidak netral. Ada banyak kasus yang memperlihatkan keberpihakan penyelenggaraan terhadap kandidat tertentu. Kedua, Daftar pemilih tetap dalam surat suara. Ketiga, para organisasi elit kampus yang dominan bertarung di pemilihan raya (PEMIRA) masih menganggap politik hanya sebagai sarana untuk kekuasaan pribadi. Seperti yang diungkapkan oleh







Bagi kalangan aktivis mahasiswa memang jelas bahwa politik kampus sebagai wadah untuk membangun kesadaran kritis bagi mahasiswa terkait kondisi sosial politik yang terjadi di lingkungan masyarakat nantinya.

#### **4. Analisis Teori**

Analisis data dalam penelitian ini merupakan tahap akhir untuk pengecekan dan konfirmasi hasil temuan data dengan menggunakan pendekatan teori. Pada tahap analisis ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi tentang Politik Kekuasaan Pemilihan Raya (PEMIRA) Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan menggunakan teori Pilihan Rasional James S. Coleman

##### **a. Analisis Pilihan Rasional James S. Coleman Terhadap Politik Kekuasaan Pemilihan Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya.**

Setelah melakukan penelitian dan pengamatan terhadap fenomena Politik Kekuasaan Pemilihan Raya (PEMIRA) Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, terdapat temuan dilapangan yang berkaitan dengan permasalahan sosial politik.

Teori pilihan rasional adalah salah satu dari pengaruh intelektual yang mengembangkan teori pertukaran, khususnya kecenderungannya dalam mengandaikan adanya aktor rasional. Prinsip dasar pilihan rasional adalah teori permainan.

Aktor menjadi fokus teori pilihan rasional. Aktor dipandang syarat dengan tujuan atau memiliki maksud. Jadi aktor memiliki



tujuan atas tindakannya. Jadi dalam proses politik kekuasaan yang terjadi pada pemilihan raya Dewan Eksekutif mahasiswa yang menjadi aktor adalah mahasiswa-mahasiswa yang terlibat dalam pemilihan raya tersebut. mulai dari MUSEMA, KOPURWA, dan partai mahasiswa. Para aktor tersebut memiliki tujuan untuk merebukan bangku kekuasaan yang ada di pemerintahan mahasiswa yaitu Dewan Eksekutif Mahasiswa dan Senat Mahasiswa.

Meskipun teori pilihan rasional berangkat dari tujuan atau maksud aktor, paling tidak harus diperhatikan dua hambatan utama tindakan tersebut. adalah sumber daya. Aktor memiliki sumber daya yang berbeda dari aktor lain. Bagi mereka yang memiliki banyak sumber daya, tercapainya tujuan mungkin saja relatif mudah. Namun, bagi mereka yang punya sedikit, tercapainya tujuan mungkin sulit bahkan tidak mungkin. Yang menjadi sumber daya dalam pemilihan raya tersebut adalah strategi politik.

Dalam pemilihan raya setiap partai harus merancang sebuah strategi yang matang dalam pemilihan raya, mulai dari dominasi sistem didalam anggota penyelenggara maupun tim sukses untuk mensosialisasikan kandidat dikalangan mahasiswa itu. sehingga dalam strategi itu, bisa muda mencapai sebuah tujuan aktor tersebut.

Coleman mengakui bahwa dalam kehidupan nyata orang tak selalu berperilaku rasional, tetapi ia merasa bahwa hal ini hampir tak berpengaruh pada teorinya. Ia berasumsi bahwa ramalan teoritis yang







Universitas). Dalam kongres tersebut yang nantinya akan menghasilkan kebijakan-kebijakan dalam proses pemilihan. Dan kedua, KOPURWA, setelah sidang KBMU membuat kebijakan-kebijakan. KOPURWA membuat persyaratan-persyaratan pendaftaran calon kandidat. Tetapi dalam aturan-aturan tersebut terkadang mempersulit para kandidat. Bahkan dalam aturan itu, ada keterpihakan kepada aktor yang satu. Sehingga bisa menguntungkan aktor satu dan mempersulit aktor yang lain.

### 3) Aktor Korporat

Sebagai seorang teoritis pilihan rasional, Coleman mulai dari individu dan dari gagasan bahwa semua hak dan sumber daya tersedia pada level ini. kepentingan individu menentukan seluruh peristiwa. Didunia modern aktor korporat semakin penting.

Bagi Coleman, perubahan sosial terpenting adalah munculnya aktor korporat untuk melengkapi aktor “pribadi alami”. Keduanya dipandang sebagai aktor karena “mengontrol sumber daya dan peristiwa, kepentingan akan sumber daya dan peristiwa, serta kapabilitas untuk bertindak merealisasikan kepentingan - kepentingan tersebut melalui control”.

Dalam proses pemilihan raya ini, yang mengontrol sebuah sistem pemilihan adalah mahasiswa yang memilih (Hak suara). Karena dalam penyelenggara pemilihan raya hak suara mahasiswa memberikan pengaruh besar terhadap tujuan untuk memenangkan

